

ANALISIS KONFLIK AMBON MENGGUNAKAN PENAHAPAN KONFLIK SIMON FISHER

Jerry Indrawan

Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta

E-mail: jerry.indrawan@upnvj.ac.id

Ananda Tania Putri

Program Studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta

E-mail: anandatania@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia, konflik memang sering terjadi dan bukan hal yang baru. Hal tersebut disebabkan karena beragamnya etnis dan agama yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Konflik biasanya disebabkan karena adanya dua situasi atau suasana/keadaan yang saling berhadap-hadapan atau berlawanan, saling bertolak belakang dan memiliki makna yang sangat berbeda, antara individu atau kelompok lain. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah hal yang berkaitan dengan etnis dan agama seperti, Konflik yang terjadi di Maluku tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi konflik Ambon dengan menggunakan penahapan konflik dari Simon Fisher. Penahapan konflik dianggap dapat menunjukkan peningkatan atau penurunan intensitas konflik yang digambarkan dalam skala waktu tertentu. Penahapan konflik digunakan untuk mengidentifikasi pola konflik di awal proses analisis dan membantu merumuskan strategi di akhir proses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah melalui studi pustaka. Sumber data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita online, internet dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konflik yang terjadi di Maluku tahun 1999. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa konflik di Maluku pecah mulanya karena konflik antar etnis kemudian berkembang menjadi konflik agama Islam dan Kristen.

Kata Kunci : Konflik, Maluku, Etnis, Agama.

PENDAHULUAN

Manusia dan tanah Maluku telah lama dicari dan dikenal oleh negara-negara di seluruh dunia, terutama orang Arab (sejak Mesir kuno), Cina (sejak Cina kuno), negara-negara yang tinggal di benua Eropa dan negara-negara lain, karena karunia tertentu yang Tuhan Berikan bagi manusia dan tanah Maluku. Pada masa lalu, rempah-rempah (cengkeh dan pala) banyak dicari oleh berbagai negara. Berbagai sumber daya alam bawah laut, dalam laut dan darat telah dikembangkan dan dimanfaatkan, tetapi masih banyak yang tidak terpakai. Meski suasana kehidupan yang damai sudah menjadi ciri khas anak-anak Maluku, namun realita konflik tidak bisa dihindari. Konflik yang terjadi di Maluku dimulai pada tanggal 19 Januari 1999 dan berlangsung selama beberapa tahun (selanjutnya disebut konflik Maluku), yang mengakibatkan kematian dan penderitaan manusia, perusakan harta benda,

pemaksaan atau konversi agama. Konflik Maluku yang dianggap sebagai konflik kerusuhan, kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia berskala sangat besar, telah menjadi catatan sejarah yang kelam dan sangat buruk dalam proses peradaban manusia, yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) , yang diakui oleh Undang-Undang Dasarnya Menjadi negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Waileruny, 2010: 1).

Di bawah sistem orde baru, Maluku merupakan salah satu daerah yang kurang mendapat perhatian sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Setelah orde baru, Baharudin Yusuf Habibi, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, menjadikan Maluku dan Maluku Utara fokus utama pemerintah Indonesia yang meliputi isu-isu seperti kepentingan elit lokal, konflik etnis dan agama. Konflik yang dimulai pada tahun

1999 tersebut mengejutkan banyak aspek di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Konflik pecah dari kelompok etnis dan kemudian berkembang menjadi konflik agama antara Islam dan Kristen. Awalnya hanya berbentuk konflik sederhana yang menimbulkan kerusuhan terbatas, namun terus berlanjut menjadi kerusuhan sporadic yang melibatkan etnis tertentu dan berakhir menjadi konflik antara agama Islam dan Kristen (Waileruny, 2010: 97).

Artikel ini mencoba untuk melakukan pengelolaan konflik terkait dengan konflik Maluku tahun 1999. Artikel ini menggunakan penahapan konflik dari Simon Fisher untuk menganalisis dan mengidentifikasi kronologi kejadian dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan menggunakan penahapan konflik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam konflik serta menyusun strategi. alat bantu tersebut juga dapat menjadi upaya untuk menganalisis berbagai kejadian dan dinamika dalam konflik. Sehingga, artikel ini mencoba untuk menggunakan penahapan konflik untuk melakukan pengelolaan terhadap konflik Maluku tahun 1999.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Menurut Suparlan (1997), metode kualitatif sering juga disebut metode humanistik, karena cara hidup dan cara pandang, selera, ungkapan emosi serta keyakinan dari masyarakat yang diteliti relevan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Namun bagi John W. Creswell (1994), metode kualitatif diartikan sebagai pemahaman tentang masalah sosial atau manusia berdasarkan penciptaan gambaran keseluruhan yang tersusun dari kata-kata, pelaporan secara rinci pandangan informan, dan berlatar ilmiah (Samsu, 2017: 86).

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, jurnal, berita online, internet dan lain sebagainya. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan

teknik dokumentasi, dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable-variabel yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Ataupun yang berbentuk gambar seperti seperti foto, sketsa dan sebagainya. Bahkan bisa berbentuk karya seperti gambar dan film, namun tetap dengan pertimbangan bahwa semua sumber yang dipakai memang relevan dengan permasalahan atau topik dalam penelitian ini (Samsu, 2017: 99).

Untuk analisis data menggunakan teknik analisis isi. Analisis data merupakan sebuah upaya atau langkah untuk menggambarkan data yang diperoleh secara deskriptif, naratif atau tabulasi data. Sehingga menghasilkan kesimpulan atau penjelasan yang dapat ditarik dari analisis data untuk menghasilkan kesimpulan penelitian. Analisis isi merupakan teknik penelitian yang dapat membuat kesimpulan yang dapat ditiru (direproduksi) dan keabsahan data dengan mempertimbangkan konteksnya (Samsu, 2017: 111).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Konflik

Konflik secara etimologis berasal dari kata con yang berarti bersama dan fligere yang berarti tabrakan atau benturan. Dengan begitu, konflik dalam kehidupan sosial dapat diartikan sebagai benturan keinginan, pendapat dan kepentingan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Pertentangan tersebut dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Namun, biasanya konflik berawal dari pertentangan non fisik yang kemudian terus berkembang menjadi pertentangan fisik yang dalam skala kecil tidak menggunakan kekerasan, sedangkan dalam skala besar menggunakan kekerasan. Menurut Robert MZ Lawang, konflik merupakan sebuah perjuangan untuk memperoleh status, nilai dan kekuasaan yang bertujuan tidak hanya untuk keuntungan semata tetapi juga untuk menundukkan saingan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, konflik merupakan sebuah proses sosial antara individu

maupun kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara menantang pihak lain yang disertai dengan kekerasan dan ancaman. Dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan sebuah proses sosial antara individu maupun kelompok dalam masyarakat, karena adanya perbedaan pemahaman dan kepentingan yang menimbulkan jurang pemisah atau gap antara pihak-pihak yang bertikai (Rahmat, 2019: 3).

Menurut KBBI, konflik memiliki arti perselisihan, pertentangan atau percekocan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 723). Arti tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana peristiwa tersebut terjadi. Menurut sudut pandang tiap orang, konflik memiliki arti yang berbeda. Konflik dapat diartikan sebagai peristiwa yang positif atau negatif. Dalam arti positif, konflik diartikan sebagai keadaan terjadinya pertentangan atau perselisihan antara dua orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari orang lain, dan tidak ada perasaan terganggu diantara keduanya. Konflik ini dapat menyebabkan peningkatan produktivitas individu, kelompok atau organisasi. Sedangkan dalam arti negatif, konflik didefinisikan sebagai tindakan ketidaksepakatan antara dua orang atau lebih yang berjuang untuk menang atau kalah. Artinya, dalam konflik negatif, orang berusaha untuk saling berebut dan menjatuhkan untuk mendapatkan label sebagai orang yang benar. Pada perspektif negatif, konflik dipandang sebagai peristiwa yang perlu dihindari karena dapat mengurangi efisiensi dalam kelompok atau organisasi (Puspita, 2018: 5).

Selain itu, konflik dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok yang memiliki sasaran dan tujuan yang tidak sejalan. Namun disisi lain, konflik juga dapat berguna. Perbedaan pendapat yang cenderung menimbulkan konflik dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan,

sehingga dapat menciptakan sebuah situasi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Dari tingkat yang paling kecil, pada tingkat antar individu hingga kelompok, organisasi, masyarakat dan negara, semua bentuk hubungan manusia tersebut selalu mengalami pertumbuhan dan perubahan bahkan tidak jarang terjadi konflik. Sehingga konflik dapat timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan tersebut. Misalnya, seperti kesenjangan status sosial dikarenakan kurang meratanya kemakmuran serta akses terhadap sumber daya dan kekuasaan yang tidak seimbang, kemudian menimbulkan berbagai masalah sosial seperti diskriminasi, penindasan, kejahatan, kemiskinan dan pengangguran. Semua tingkat tersebut saling berkaitan dan membentuk sebuah potensi kekuatan yang menghasilkan perubahan baik secara konstruktif maupun destruktif (Fisher, 2001: 4).

Konflik juga dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak beranggapan bahwa pihak lain telah membawa pengaruh secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian dan kepentingan pihak pertama. Definisi tersebut mencakup berbagai konflik yang dialami orang, mulai dari ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta hingga ketidaksepahaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan lain sebagainya (Wahyudi, 2015).

Konflik memberikan bukti nyata yang menjadikannya sebagai satu pokok bahasan penting dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, biologi, antropologi, psikologi dan komunikasi. Sosiologi memandang konflik sebagai bentuk interaksi sosial antar individu dalam lingkungannya (Sanders, 2007: 2). Selanjutnya, biologi memandang konflik sebagai hasil dari proses-proses biologis yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu (Tanner 1988; Bailey 1988). Sementara itu, antropologi memandang konflik sebagai bagian dari budaya dan merupakan hasil dari interaksi sosial antar individu dan lingkungannya.

Sedangkan psikologi memandang konflik sebagai hasil dari persepsi, interpretasi atau kondisi psikologi dan mental individu (Canli, 2009; Fincham, 2003). Disisi lain, komunikasi memandang konflik sebagai hasil dari proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan dalam situasi atau kondisi tertentu (Fajar, 2016).

Konflik muncul disebabkan karena seseorang yang tidak terbiasa untuk menyikapi secara tepat perbedaan yang ada. Manusia diciptakan dengan watak dan sifat yang berbeda, sehingga cara dan sikap setiap orang berbeda pula. Selain itu, timbulnya konflik disebabkan oleh sikap egoistis yang selalu merasa benar. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri setiap individu dalam berinteraksi. Perbedaan tersebut biasanya menyangkut ciri fisik, pengetahuan, kepandaian, keyakinan, adat seseorang dan lain sebagainya. Sehingga dalam interaksi sosial, konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam masyarakat. Tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik. Konflik akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Rahmat, 2019: 9).

Menurut Johan Galtung, sumber konflik berasal dari adanya perbedaan kepentingan antar aktor dan perbedaan nilai dari antar aktor tersebut. Sedangkan menurut C.R. Mitchell, sumber konflik berasal dari sumber daya yang terbatas, tujuan dan kepentingan yang berbeda, serta nilai yang berbeda pula dalam setiap sistem sosial. Selain itu, sumber konflik lain juga dapat berasal dari SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), rivalitas negara, komunikasi, kebutuhan dasar manusia dan ketidakadilan sistem internasional sampai identitas sosial dan budaya. (Indrawan, 2019: 71) Menurut model Dahrendorf, dalam setiap masyarakat memiliki potensi untuk timbulnya konflik. Hal itu dikarenakan setiap masyarakat memiliki kepentingan yang harus terpenuhi dan dalam pemenuhan kepentingan tersebut biasanya harus mengorbankan kepentingan masyarakat lain. Perasaan tertekan karena

perbuatan pihak lawan merupakan salah satu tanda adanya potensi konflik dalam diri seseorang atau sekelompok orang. Keberadaan potensi konflik sosial biasanya mengikuti pola-pola yang berlaku dalam terwujudnya konflik antar individu. Potensi konflik yang meledak menjadi konflik antar individu, bisa saja terbatas hanya pada dua orang yang bersangkutan, namun dapat juga meluas dengan melibatkan anggota keluarga dan kerabat, komunitas, atau masyarakat suku bangsa kedua belah pihak (Suparlan, 2014).

Proses konflik terdiri atas lima tahapan. Pertama, oposisi atau ketidakcocokan potensial, dimana tahap yang membuat kesempatan untuk munculnya konflik. Kedua, kognisi dan personalisasi, merupakan persepsi salah satu pihak terkait konflik yang sedang dihadapi. Ketiga, yaitu maksud, dimana hal tersebut merupakan sebuah keputusan untuk dapat bertindak dengan menggunakan cara tertentu dari pihak yang berkonflik. Keempat, yaitu perilaku, pada tahap ini mencakup tindakan, pernyataan dan reaksi untuk menghancurkan pihak lain, dapat berupa ancaman dan ultimatum, serangan fisik yang agresif atau serangan verbal yang tegas. Kelima, yaitu hasil, yang merupakan jalinan aksi-reaksi antara pihak yang berkonflik dan menghasilkan konsekuensi, seperti perbaikan kinerja dalam kelompok (Suparlan, 2014: 35).

Dari semua penjelasan konflik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik merupakan sebuah situasi ketika adanya perbedaan atau ketidakselarasan tujuan, kepentingan dan nilai antar individu maupun kelompok. Konflik merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Sumber konflik bermula dari adanya perbedaan baik alami maupun non-alamiah. (Indrawan, 2019: 73) Konflik selalu menjadi pewarna dalam kehidupan, mulai dari konflik yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Konflik terjadi karena adanya perbedaan persepsi, pendapat dan kepentingan. Ada konflik yang dapat diselesaikan secara sepenuhnya, ada yang

setengah selesai dan bahkan ada juga konflik yang tidak ada solusinya untuk waktu yang lama (Wahyudi, 2015: 1).

Kronologi Konflik Ambon

Konflik Maluku dimulai pada tanggal 19 Januari 1999 dan berlangsung selama beberapa tahun, dapat dilihat sebagai proses sosial yang terpisah dengan tingkat kekerasan yang tinggi dan jumlah korban yang besar. Pendapat para pengamat menunjukkan bahwa setidaknya ada enam (enam) indikator yang mengarah pada konflik Maluku, yaitu Pertama, karena kenakalan remaja atau murni kriminalitas. Kedua, karena penempatan pegawai di Kantor Gubernur Maluku dan perguruan tinggi hanya dari kelompok tertentu dan dari daerah tertentu. Ketiga karena upaya PDIP untuk memenangkan pemilihan umum. Keempat, karena kecemburuan sosial masyarakat adat Maluku terhadap pendatang yang memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi darinya. Kelima, Sebagai konflik antara kelompok agama, yaitu konflik antara Kristen dan Muslim. Keenam, akibat upaya Republik Maluku Selatan dalam rangka disintegrasi bangsa (Waileruny, 2010: 156).

Konflik Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan lama antara Muslim dan Kristen, meskipun situasinya lebih rumit. Konflik kekerasan Maluku terutama terkonsentrasi di Ambon, yang merupakan salah satu konflik paling merusak yang pecah setelah jatuhnya rezim Soeharto. Dari tahun 1999 hingga 2002, konflik ini merenggut hampir 5.000 nyawa dan membuat sepertiga penduduk Maluku dan Maluku Utara mengungsi. Sebelum pecahnya konflik antar umat beragama di Kota Ambon, juga banyak terjadi perang antar umat beragama di wilayah lain di Indonesia. Pada November 1998, terjadi kerusuhan antara massa Kristen Ambon dan Muslim di Ketapang, Jakarta Utara. Dilaporkan bahwa setelah kerusuhan, hampir 200 preman Ambon dikirim kembali ke Maluku oleh TNI angkatan laut Indonesia (Buchanan, 2011: 15).

Menurut saksi di Ambon, massa bertindak sebagai provokator dalam insiden kekerasan pertama di Ambon. Pada bulan Desember 1998, terjadi pertempuran dan serangan pembakaran antara desa-desa Kristen dan Muslim di beberapa wilayah Ambon, yang sering dipicu oleh tentara Indonesia. Pada 14 Januari 1999, umat Kristen dan Muslim melakukan kerusuhan di Dobo, Maluku Tenggara. Yang paling sering disebut-sebut sebagai pemicu konflik di Ambon adalah peristiwa yang terjadi pada saat hari raya Idul Fitri pada 19 Januari 1999. Perselisihan kecil terjadi antara seorang pemuda Kristen dari daerah Mardika Ambon dan seorang pemuda Muslim dari Batumerah, sebuah desa dekat Mardika. Desas-desus yang memperburuk perpecahan yang ada antara komunitas Kristen dan Muslim mulai, mengubah desa-desa di sekitarnya menjadi kekerasan. Pada awalnya, pertempuran hanya terjadi antara orang Kristen Ambon dan pendatang Muslim dari Sulawesi Selatan (Bugis, Buton dan Makassar), kedua belah pihak saling melancarkan serangan mendadak (Buchanan, 2011: 15).

Berbeda dengan Ambon, semua pertempuran di Maluku Utara berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Peta berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Maluku Utara dari tahun 1999 hingga 2001 merupakan jaringan simpang siur yang terjadi di berbagai daerah, bertitik tempat yang tidak ada masalah sama sekali. Semua ini terjadi di bawah pengaruh pertempuran Muslim-Kristen di Ambon sebelah selatan, yang telah berkecamuk sejak Januari 1999. Bahkan di Ternate, ada beberapa pertempuran antara orang Kristen dan Muslim, tetapi ada juga yang tidak. Ada empat tahap yang terjadi, yaitu: Pertama, konflik pertama terjadi di pusat Halmahera pada bulan Agustus 1999. Terjadi konflik antara dua suku, penduduk asli Kao yang merupakan campuran Muslim Kristen dan imigran Muslim dari Makian. Kedua, pada bulan Oktober 1999, Makian yang sama diserang lagi dan melarikan diri ke Ternate terdekat. Para

simpatisan Muslim tersanjung dengan penderitaan orang Makian, mereka menyerang orang-orang Kristen di Ternate, dan kemudian mereka melarikan diri ke daerah-daerah Kristen di tempat lain. Akibatnya, konflik etnis lokal akhirnya berkembang menjadi konflik agama provinsi. Ketiga, semua ini (perkembangan di Ambon) memicu pertempuran antara Muslim dan Kristen di wilayah Kristen fanatik di utara Tobelo pada Desember 1999. Pertempuran berlangsung selama beberapa bulan di daerah terpencil. Keempat, ketika semua ini akhirnya berkembang menjadi pertempuran tiga hari di Pusat Politik Ternate mulai 28 Desember, pertempuran itu bukan lagi pertempuran antara Muslim dan Kristen, tetapi antara Muslim dan Muslim (van Klinken, 2007: 181).

Faktor-faktor Penyebab Konflik Ambon

Sebuah konflik yang timbul selalu dilatarbelakangi karena adanya penyebab atau permasalahan yang terjadi. Banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya sebuah konflik. Semua itu tergantung pada tujuan, motif dan kepentingan yang beragam. Konflik yang terjadi di Ambon, bukan hanya semata-mata karena faktor perbedaan agama. Menurut (Rudiansyah, 2016: 161) Banyak faktor-faktor lain yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik. Beberapa faktor yang memicu terjadinya eskalasi konflik di Ambon yaitu Pertama, dimensi ekonomi (stratifikasi sosial). Perekonomian memegang peran penting sebagai pemicu konflik. Hal tersebut menjadi wajar, karena ekonomi merupakan unsur utama dalam kehidupan manusia. Secara ekonomi, kehidupan sosial akan membentuk suatu hierarki sosial atau sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Kedua, dimensi kebudayaan. Agama merupakan unsur penting dalam pembentukan kebudayaan. Terdapat perbedaan antara masyarakat Muslim dan masyarakat Kristen dalam hal nilai, norma, adat istiadat dan budaya. Perbedaan

tersebut tercermin dalam perbedaan sistem sosial, nilai dan norma dalam masyarakat. Ketiga, dimensi politik (politik etnis). Hubungan yang semula harmonis antara kelompok yang berbeda, suatu saat akan menjadi konflik ketika kelompok tersebut dijadikan sasaran manipulasi politik untuk kepentingan para elit politik. Sengketa wilayah dan keberadaan elit politik yang ingin mewujudkan kepentingannya masing-masing telah menyebabkan perselisihan antara dua kelas etnis yang awalnya hidup berdampingan. Mereka tidak hanya saling mempertahankan perbedaan ideologi dan agama, tetapi bahkan saling membunuh tanpa ragu. Salah satu pemicu konflik di Ambon mungkin disebabkan oleh politik etnis. Karena masyarakat Ambon terdiri dari berbagai ras, ada 4 kelompok etnis utama di Ambon yaitu Buton, Bugis, Makassar, dan Ambon. Konflik muncul karena dominasi satu suku, sedangkan suku lain merasa dirugikan dan ingin memberontak. Bahkan dalam hubungan antara BBM (Buton, Bugis dan Makassar) dengan suku Ambon sulit untuk menjalin hubungan yang baik dan hidup berdampingan.

Keempat, dimensi diferensiasi ras dan etnis. Indonesia merupakan negara yang multikultural dengan banyak suku bangsa atau etnis. Jika terjadi gesekan-gesekan antar bangsa, etnosentrisme yang berlebihan pasti akan menimbulkan konflik. Konflik antar etnis yang terjadi mungkin juga merupakan warisan dari konflik leluhur. Terdapat sub kecil-kecil atau fam-fam (marga) di Ambon. Berbagai macam ras dan suku mewarnai Ambon.

Kelima, dimensi diferensiasi agama. Beberapa agama yang diakui dan dijamin secara resmi oleh pemerintah adalah Islam, Kristen protestan, Kristen katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Di satu sisi, perbedaan agama sangat rapuh karena dapat menjadi bibit perpecahan. Sikap intoleransi pemeluk agama yang berbeda dan kurangnya rasa saling menghormati hak-hak orang lain menjadi faktor utama pemicu konflik dan perpecahan. Konflik di

wilayah Ambon disebabkan oleh perbedaan agama atau kepercayaan yaitu konflik antara masyarakat Muslim dan masyarakat Kristen.

Secara ekonomi, sistem kelas sosial atau stratifikasi sosial akan terbentuk di dalam kehidupan masyarakat. Stratifikasi sosial itulah yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Stratifikasi sosial menimbulkan perbedaan akses golongan antara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Sehingga tingkat kekuasaan, hak istimewa seseorang akan tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik individunya. Selain itu, perbedaan sistem sosial, norma dan nilai-nilai dalam masyarakat antara masyarakat Muslim dengan masyarakat Kristen juga dapat memicu konflik. Konflik di Ambon merupakan konflik yang melibatkan antara suku atau antar etnis yang ada (Rudiansyah, 2016: 166). Primordialisme kesukuan merupakan faktor penyebab awal terjadinya konflik. Bermula dari perkelahian individu antara orang Ambon yang beragama Kristen dan Muslim. Karena perbedaan etnik tersebut, konflik berubah menjadi konflik agama yang mengidentikkan dengan identitas agama dan kelompok sosial kedua individu tersebut (Ismail, 2021: 457).

Jika dikaitkan dengan analisis fisher dengan penahapan konflik, bahwa penahapan konflik digunakan untuk dapat melihat tahapan dan siklus peningkatan dan penurunan dalam sebuah konflik. Hal tersebut dapat kita lihat melalui faktor-faktor pemicu konflik diatas. Ketika suatu konflik mengalami peningkatan atau penurunan, dari faktor apa konflik itu terjadi. Dalam kasus di Ambon, konflik menjadi memuncak disebabkan karena faktor dimensi diferensiasi etnis dan agama. Konflik yang berawal dari konflik etnik, kemudian mengalami peningkatan menjadi konflik agama. Dengan menggunakan penahapan konflik, kita dapat melihat faktor apa yang dapat menjadi pemicu dan meningkatkan dan menurunkan suatu

konflik. Dengan demikian, kita dapat menghindari dan meminimalisir terjadinya konflik dari faktor-faktor diatas dengan berbagai upaya penyelesaian konflik yang sesuai dengan situasi dan kondisi konflik di daerah tersebut.

Mengelola Konflik: Penahapan Konflik di Maluku Tahun 1999

Untuk mengetahui penyebab konflik dan aktor atau kelompok elit yang terlibat dalam konflik, perlu dilakukan analisis. Analisis konflik adalah proses aktual mengkaji dan memahami realitas konflik dari berbagai sudut pandang. Tulisan ini menggunakan salah satu alat bantu analisis yang dikemukakan oleh Simon Fisher, yaitu alat bantu analisis penahapan konflik. Penahapan konflik adalah grafik yang menunjukkan peningkatan atau penurunan intensitas konflik yang digambarkan dalam skala waktu tertentu. Alat ini dirancang untuk melihat tahapan dan siklus peningkatan dan penurunan konflik, mendiskusikan pada tahap mana situasi saat ini, mencoba memprediksi pola intensitas konflik di masa depan untuk menghindari pola tersebut, dan menentukan periode waktu yang dianalisis dengan menggunakan alat bantu lain. Alat analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi pola konflik di awal proses analisis dan membantu merumuskan strategi di akhir proses (Fisher, 2001: 18).

Analisis penahapan konflik terdiri dari lima tahap yaitu Pertama, pra konflik. Tahap ini merupakan periode di mana tujuan antara kedua pihak atau lebih terdapat ketidaksesuaian, yang kemudian mengarah kepada konflik. Dilihat dari konflik di Maluku pemicu konflik di Ambon merupakan peristiwa yang terjadi pada saat hari raya umat Muslim pada 19 Januari 1999. Perselisihan kecil terjadi antara seorang pemuda Kristen dari daerah Mardika Ambon dan seorang pemuda Muslim dari Batumerah, sebuah desa dekat Mardika. Awalnya, perkelahian hanya terjadi antara orang Kristen Ambon dan pendatang Muslim dari Sulawesi Selatan

(Bugis, Buton dan Makassar) dan kedua belah pihak saling melancarkan serangan mendadak.

Kedua, konfrontasi. Pada tahap di mana konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang percaya bahwa ada masalah, para pendukungnya dapat memulai demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Dalam konflik Maluku, konflik antara dua kelompok etnis terjadi di pusat Halmahera pada bulan Agustus 1999. Kelompok etnis tersebut dari penduduk asli Kao yang merupakan campuran Muslim-Kristen dan imigran Muslim dari Makian. Pada bulan Oktober 1999, Makian yang sama diserang lagi dan melarikan diri ke Ternate terdekat. Para simpatisan Muslim tersanjung dengan penderitaan orang Makian, mereka menyerang orang-orang Kristen di Ternate, dan kemudian mereka melarikan diri ke daerah-daerah Kristen di tempat lain. Akibatnya, konflik etnis lokal akhirnya berkembang menjadi konflik agama provinsi.

Ketiga, krisis. Pada tahap ini merupakan puncak tertinggi dari konflik, ketika ketegangan atau kekerasan mencapai puncaknya. Secara umum, ini adalah periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Konflik Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan jangka panjang antara Muslim dan Kristen, meskipun situasi mungkin lebih rumit. Konflik kekerasan Maluku terutama terkonsentrasi di Ambon merupakan salah satu konflik paling merusak setelah terjadinya rezim Soeharto. Dari tahun 1999 hingga 2002, konflik ini merenggut hampir 5.000 nyawa dan membuat sepertiga penduduk Maluku dan Maluku Utara mengungsi.

Keempat, akibat. Tahap ini merupakan konsekuensi dari krisis. Satu pihak dapat menundukkan pihak lain, atau dapat memasuki gencatan senjata (jika perang terjadi). Salah satu pihak dapat menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Dalam konflik Maluku, pada tanggal 24 Oktober, seorang pejuang Kao bernama

Benny Bitjara melakukan serangan balik setelah diancam oleh Makian karena menduduki wilayah Makian di pagi hari. Setiap rumah Makian di daerah itu terbakar habis. Seluruh penduduk Makian yang berjumlah 17.000 orang mengungsi ke barat melintasi selat ke Ternate dan Tidore. Pada tanggal 27 Desember, armada Kristen kembali dipimpin oleh Benny Bitjara dengan bantuan berbagai aliansi Kao, dan berhasil melawan keesokan harinya dengan berita bahwa Gereja Silo di Ambon telah dibakar. kemudian mereka kembali menguasai kota. Mereka melakukannya dengan keyakinan yang teguh. Mereka membunuh ratusan pria, wanita dan anak-anak Muslim dalam beberapa pembantaian. Penghancuran rumah, tempat ibadah, kantor pemerintah dan bisnis mencapai tingkat yang mengerikan terutama di Galela, barat Tobelo.

Kelima, pasca konflik. Tahap ini merupakan situasi yang telah diselesaikan dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan telah mereda dan hubungan antara kedua pihak bergerak ke arah yang lebih normal. Dalam konflik Maluku, perang berakhir melalui berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh penduduk Halmahera Utara. Mereka saling berhubungan dan berkomunikasi sejak Agustus tahun 2000 dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan pada Juni tahun berikutnya.

Terkait konflik yang berakibat pada semua aspek, salah satunya adalah agama di Maluku, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa fase dan eskalasi konflik. Seperti yang ditulis oleh peneliti Lambang Triyono et.al, konflik kekerasan Maluku dibagi menjadi empat fase. Fase pertama yaitu konflik yang berawal dari preman dan berlanjut dengan kerusuhan Ambon. Fase kedua yaitu kerusuhan Ambon. Fase ketiga yaitu meluasnya konflik Ambon ke pulau-pulau di sekitarnya. Dan fase keempat yaitu masuknya Laskar Jihad yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib ke Maluku. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, Nurhasim dan Ratnawati membagi konflik kekerasan

Maluku menjadi tiga fase. Fase pertama yaitu konflik berdarah yang terjadi pada 19 Januari 1999 hingga menjelang Pemilu. Fase kedua yaitu konflik Pemilu tahun 1999. Sedangkan fase ketiga yaitu masuknya Laskar Jihad ke Maluku pada April 2000. Berdasarkan periode dan fase-fase konflik yang terjadi, dapat diketahui bahwa konflik tersebut tidak hanya terjadi dalam satu peristiwa. Suatu konflik dapat berkaitan erat dan bersambung dengan konflik lain. Dalam artian, konflik serta kekerasan yang terjadi di Maluku, pertama kali terjadi di Ambon yang kemudian tersebar ke daerah lain di luar Ambon. Dalam konflik Maluku, Ambon merupakan pusat pertama kali konflik dan kekerasan terjadi. Sedangkan konflik di luar Ambon (konflik Maluku) tidak selalu berkaitan secara langsung dengan konflik Ambon (Rahawarin, 1999: 98).

Selain itu, terdapat tiga komunitas dalam hubungan sosial masyarakat Ambon yaitu komunitas Ambon beragama Islam, beragama Kristen dan kelompok etnis BBM. Dalam hubungan sosial ketiga komunitas tersebut terdapat batasan-batasan sosial yang dapat dijembatani dengan baik dan ada pula yang tidak, seperti kelompok etnis BBM dan komunitas Ambon beragama Kristen yang tidak dapat dijembatani. Sebelum terjadinya konflik, tidak ada batas-batas sosial antara komunitas tersebut. Namun, setelah konflik terjadi, terlebih setelah pembakaran dan perusakan tempat-tempat ibadah yang menyatakan konflik Ambon sebagai konflik agama, maka batas-batas sosial tersebut muncul bentuk kecurigaan, sakit hati dan ketidakpedulian. Afiliasi kelompok diatas telah menimbulkan ketidaksetiaan sosial atas dasar religius maupun bisnis. Ketika suatu kepentingan dapat disatukan dan memberikan keuntungan, kemudian kepentingan bersama tersebut diganggu oleh pihak lain, maka hal tersebut akan menciptakan ketidaksetiaan yang menjadi semakin kuat (Alqadrie, 1999: 43).

Dari segi lain, keberhasilan rata-rata pendatang baru BBM dan komunitas Ambon beragama Islam dalam berbagai sektor telah memberikan peningkatan pada pencapaian ekonomi komunitas tersebut. Bahkan tarif pencapaian ekonomi tersebut diatas rata-rata komunitas Ambon beragama Kristen. Sehingga, masyarakat menganggap bahwa itu bukan semata-mata hasil kerja keras, namun terdapat praktek-praktek KKN dan jaringan hubungan dengan Pemerintah Pusat di dalamnya. Maka dari itu, kondisi tersebut menciptakan sebuah kesenjangan sosial ekonomi yang tidak dapat terhindarkan. Kebencian, kecemburuan sosial dan permusuhan mulai tersebar, khususnya terhadap anggota kelompok etnis BBM yang telah menguras kekayaan Maluku untuk komunitasnya dan menimbulkan penderitaan bagi kelompok etnis lainnya. Hancurnya sistem nilai budaya selama kerusuhan berlangsung membuat suasana ketidakpastian hukum serta ketidaktegasan aparat hukum dan petugas keamanan dalam menangani kerusuhan yang terjadi. Keadaan tersebut memunculkan ketidakpercayaan terhadap pranata adat, pemerintah dan birokrasi (Alqadrie, 1999: 44).

Berdasarkan penahapan konflik menurut Fisher diatas, kita dapat melihat bagaimana tahapan konflik yang terjadi di Ambon. Konflik yang bermula dari dari perselisihan kecil antara suku Makian dan Mardika, namun kemudian konflik tersebut terus berkembang. Para pendukung antar suku ikut campur dan melakukan perlawanan terhadap suku lainnya, yang akhirnya konflik tersebut berubah menjadi konflik agama antara umat Muslim Makian dengan umat Kristen Mardika. Siklus peningkatan dalam konflik ini terus terjadi ketika kedua pihak saling serang hingga terjadi perang yang menimbulkan banyak orang terbunuh dari kedua pihak. Konflik ini terus memanas hingga puncak dari konflik ini adalah serangan terhadap Gereja Silo dan pembantaian Tobelo. Gereja Silo terbakar habis satu setelah Natal, yang pada hari itu juga sekitar 800 orang Muslim

Tobelo dibunuh oleh pihak Kristen. Serangan tersebut yang membangkitkan semangat para suku Kristen Mardika untuk melakukan berbagai pembantaian sebagai serangan balik terhadap suku Muslim Makian yang telah melakukan pembakaran terhadap Gereja Silo. Namun pada akhirnya kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Orang Maluku sadar bahwa mereka telah lelah bertempur untuk waktu yang cukup lama. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengakhiri konflik ini. Dengan menggunakan penahapan konflik ini kita dapat melihat bagaimana intensitas konflik yang terjadi. Hal tersebut berguna untuk dapat didiskusikan pada tahap mana situasi konflik saat ini terjadi, sehingga kita mencoba melihat pola intensitas konflik agar dapat menghindarinya di masa depan.

Upaya Penyelesaian Konflik

Ketika terjadi sebuah konflik, semua pihak berusaha untuk mencari cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Berbagai bentuk penyelesaian konflik dibuat untuk mencari alternative terbaik. Namun, setiap bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan akan menimbulkan kepentingan baru yang dapat saling bertentangan, dengan kata lain sistem sosial senantiasa akan selalu berada dalam keadaan konflik. Ada dua cara untuk menyelesaikan konflik, yaitu penyelesaian konflik persuasif dan koersif. Penyelesaian konflik persuasif menggunakan negosiasi dan musyawarah untuk menemukan titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik berunding, baik di antara mereka atau menggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah atau mediator. Cara penyelesaian konflik persuasif mengarah pada penyelesaian konflik yang tuntas atau terselesaikan, yang berarti tidak ada lagi perbedaan di antara kedua pihak yang berkonflik karena kesamaan pendapat dihasilkan secara sukarela. Cara koersif dalam penyelesaian konflik adalah pihak yang kuat menggunakan kekerasan fisik

atau ancaman fisik untuk mengintimidasi pihak lain, sehingga pihak lain yang berkonflik dengannya dapat mengubah pendapatnya dengan menyetujui pendapat pihak yang kuat. Cara koersif mengarah pada penyelesaian konflik yang berkualitas rendah karena konflik yang sebenarnya belum sepenuhnya terselesaikan (Lindawaty, 2011: 275).

Dalam kasus konflik di Ambon, berbagai upaya telah dilakukan agar konflik ini dapat berakhir, antara lain yang dipimpin oleh pemerintahan pusat dan daerah, petugas keamanan, masyarakat lokal dan kelompok perempuan serta LSM internasional dan lokal. Dua pendekatan utama dalam penanganan konflik di Maluku berasal dari upaya berikut yaitu pendekatan keamanan dan darurat; dan pendekatan pemulihan dan pembangunan. Namun, pemerintah maupun masyarakat sipil tidak memiliki strategi atau rencana jangka panjang. Alat penanganan konflik yang utama digunakan adalah bantuan dan keamanan serta mengandalkan pasukan yang dikirim dari luar Maluku. Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk memulai negosiasi damai antara komunitas Muslim dan Kristen yang akhirnya mencapai kesepakatan damai melalui Malino II pada bulan Februari 2002. Sebelum memulai pembicaraan damai Malino II, Pemerintah setempat berkali-kali mencoba untuk menyelesaikan konflik, tetapi semuanya tidak berhasil. Misalnya, Gubernur Provinsi Maluku membentuk kelompok informal para pemuka agama pada akhir Januari 1999 yang disebut sebagai Tim 6. Kelompok ini terdiri dari enam pemimpin agama dari komunitas Muslim, Kristen dan Protestan. Tuga mereka adalah mencegah perusakan terhadap masjid-masjid, gereja-gereja, rumah-rumah serta mencegah meluasnya kekerasan di Ambon. Pemimpin yang telah dipilih tersebut tidak serius untuk menjalankan tugasnya melakukan perdamaian, malah sebaliknya justru ikut terlibat dalam tindak kekerasan. Sehingga Tim 6 tersebut tidak memiliki pengaruh

terhadap penanganan atau resolusi konflik di Ambon (Lindawaty, 2011: 282).

Dalam rangka penandatanganan perjanjian damai Malino II di Pegunungan Malino, Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Februari 2002. Menteri Koordinator Urusan Politik dan Hukum, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jusuf Kalla merupakan perwakilan dari Pemerintah Pusat. Jusuf Kalla meminta Gubernur Maluku untuk memilih perwakilan dari masing-masing komunitas Muslim dan Kristen. Kedua wakil tersebut membuat komunitas yang lebih besar lagi yang terdiri dari 35 Muslim dan 34 Kristen yang berkumpul selama tiga hari di Malino. Malino II adalah sebuah perjanjian damai yang berisikan pernyataan politik bahwa konflik telah diselesaikan secara formal dan adanya keinginan politik yang kuat untuk mengurangi kekerasan.

Perjanjian Malino II terdiri atas 11 poin, yaitu Pertama, mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan. Kedua, menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan. Keempat, sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat. Kelima, segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.

Keenam, untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa. Ketujuh,

mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik. Kedelapan, pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.

Kesembilan, dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya. Kesepuluh, untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan. Kesebelas, mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Menurut Jusuf Kalla, untuk menyelesaikan konflik, hal pertama yang harus dilakukan adalah menggali kepribadian tokoh kedua belah pihak dan menggali informasi sebanyak mungkin. Tidak ada pihak yang menginginkan perdamaian karena mereka merasa telah disakiti. Namun disisi lain, jika mereka mengusulkan menghentikan konflik mereka akan melakukannya. Sehingga tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan sangat penting karena dipercaya oleh masyarakat. Media juga mendapatkan peran penting dalam situasi konflik. Media dapat digunakan sebagai alat untuk membangun perdamaian, tetapi juga dapat menjadi dalang kekerasan. Dalam konflik di Ambon, media seperti koran, radio dan

internet, berperan dalam menyulutkan kekerasan. Media juga dipecah-pecah oleh agama dan digunakan untuk menyebarkan desas-desus dan informasi palsu. Beberapa contoh media yang digunakan sebagai alat membangun perdamaian selama konflik yaitu Gerakan Damai Baku Bae dengan menyelenggarakan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengakhiri konflik di Ambon dan juga membuat pelatihan bagi para wartawan tentang pelatihan jurnalisisme perdamaian yang menciptakan Maluku Media Center (MMC) (Lindawaty, 2011: 290).

Pada konteks nasional, Pemerintah Pusat juga harus mampu membuat posisinya sendiri dan berperan secara bijaksana dalam merespon kebutuhan dan keinginan masyarakat yang hidup dan berkembang sesuai dengan realitas keragaman berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di tingkat daerah, pemerataan dan distribusi sumber daya politik dan ekonomi harus disebarakan secara merata dan adil. Hal ini disebabkan oleh struktur sosial kota Ambon yang beragam. Untuk mendorong upaya perdamaian, pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat mengembangkan manajemen masalah untuk menghadapi berbagai isu negatif yang dapat mengganggu proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung. Kemajuan yang telah dicapai dalam sosialisasi perlu dikomunikasikan kepada semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Hal ini berguna untuk menjaga dialog dengan masyarakat dan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk perdamaian di kota Ambon (Lindawaty, 2011: 292).

Selain itu, cara penyelesaian konflik lebih baik jika menggunakan model penyelesaian yang sesuai dengan kondisi wilayah dan budaya di daerah tersebut. Penyelesaian konflik juga dapat dilakukan dengan inisiatif penuh dari masyarakat yang masih memegang teguh adat lokal dan sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjamin dan menjaga keutuhan dalam

masyarakat. Pola penyelesaian konflik dalam perspektif masyarakat Ambon yaitu menggunakan pendekatan dan sistem kekerabatan atau istiadat orang Ambon yang disebut dengan istilah *pela gandong*. Kata '*pela*' berasal dari kata '*pila*' yang berarti berbuat sesuatu untuk bersama. Terkadang kata '*pila*' diberikan akhiran '*tu*' yang berarti mengamankan, menguatkan dan mengusahakan sesuatu benda agar tidak mudah pecah atau rusak. Sedangkan '*gandong*' diartikan sebagai '*berasal dari rahim yang sama*' yang mereka percaya memiliki leluhur yang sama. *Pela gandong* merupakan ikatan perjanjian oleh dua desa baik yang berbeda agama berdasarkan hubungan darah garis keturunan dua atau lebih desa di Ambon (Bakri, 2015: 55).

Jika dilihat dari perspektif ikatan kekerabatan di Ambon menjadi faktor penting terciptanya integritas sosial. Pada umumnya perbedaan agama di Ambon sering dikalahkan dengan kekuatan ikatan kekerabatan yang menganut sistem patrilineal. Dalam suatu keluarga bisa saja mengantuk agama yang berbeda, namun mereka tetap dapat menjalankan agama yang dianut dan ibadahnya dengan tenang. Sehingga pada hakikatnya, *pela gandong* sudah mengandung unsur rekonsiliasi. Nilai budaya yang telah mengakar di kehidupan masyarakat Ambon dapat menjadi modal dasar bagi meningkatkan persatuan dan kesatuan serta menjadi penyemangat dalam membangun kembali daerah pasca konflik. Hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong untuk menciptakan sinergitas yang baik dalam upaya membangun Ambon di masa yang akan datang. Jika proses konsolidasi dengan menggunakan model *pela gandong* dapat berjalan dengan baik, maka akan muncul inisiatif bersama dari masyarakat dan komunitas yang berbeda agama dan Pemerintah Kota Ambon hingga Provinsi melakukan perbaikan sarana sosial dengan bersama-sama. Kearifan lokal *pela gandong* memiliki pengaruh positif dalam

menyelesaikan konflik SARA di Kota Ambon (Bakri, 2015).

Proses konflik di Ambon melibatkan seluruh aspek masyarakat. Penyelesaian yang dilakukan sebelum Malino II bersifat reaktif dan tidak dalam rencana jangka panjang. Semenjak pecahnya konflik Maluku, banyak organisasi non pemerintah yang datang untuk sekedar memberikan bantuan atau membawa misi perdamaian. Kerjasama dari berbagai elemen dalam masyarakat menjadi hal yang sangat penting ketika negara tidak mampu untuk menyelesaikan konflik. Cara yang dilakukan oleh pihak Pemerintah yakni mempersiapkan aparat keamanan dalam jumlah banyak. Gubernur Maluku membuat tim yang terdiri dari pemuka agama Islam, Kristen dan Katolik. Namun, hal tersebut tidak dapat berjalan efektif karena pembelaan identitas kelompok masih melekat erat dalam pikiran mereka. Ketidaksiwaan para pemuka agama juga menjadi masalah, bahkan mereka diduga ikut terlibat dalam konflik. Cara lain dengan menggunakan pendekatan adat yang berusaha untuk menghidupkan kembali jalinan persatuan dan persaudaraan antara masyarakat Maluku. Kegiatan ini didukung oleh Pemerintah dan LSM lokal. Dengan memperkenalkan pendekatan adat yang dikenal dengan *pela gandong* kepada sejumlah aktivis dan pemuda. Berbagai LSM baik asing maupun lokal juga hadir sebagai mitra Pemerintah untuk membangun kembali Maluku. LSM lokal berperan sebagai penyalur bantuan dan membantu pemulangan dan pemulihan pengungsi dengan menggunakan sumber dana dari LSM asing. Pasca Malino II, konflik fisik tidak terjadi lagi. Peran LSM berubah menjadi pembangunan dan pemberdayaan (Huda, Mi'rojul, 2013: 8).

Dalam rekonsiliasi konflik Maluku, Pemerintah dan LSM telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menghentikan konflik dan berusaha untuk membangun kembali Maluku pasca konflik. Namun, peran dari Pemerintah masih belum dapat berjalan secara efektif untuk dapat

menyelesaikan konflik. Maka dari itu, dilakukan pendekatan adat yang berusaha untuk menyatukan kembali ikatan persaudaraan antar masyarakat Maluku. Karena ikatan persaudaraan yang masih kuat di antara masyarakat, diharapkan dapat menghentikan konflik. Selain itu, penting pula peran dari berbagai elemen masyarakat untuk dapat ikut berperan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Kesadaran langsung dari masyarakat Ambon untuk menghentikan konflik merupakan faktor penting dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perdamaian di Maluku. Dibutuhkan sikap yang serius dari Pemerintah, aparat keamanan, LSM hingga berbagai elemen masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam menyelesaikan konflik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa agama, ras dan etnis merupakan isu sangat sensitif yang akan menimbulkan konflik antar kelompok. Belajar dari pengalaman konflik di Maluku 1999, masyarakat sangat berharap agar konflik seperti itu tidak akan kembali terulang di masa mendatang. Peristiwa konflik Maluku tahun 1999 cukup terjadi hanya sekali saja dan tidak pernah terjadi lagi. Sehingga diperlukan rekonsiliasi konflik seperti penahanan konflik untuk dapat melihat intensitas konflik, agar tidak sampai menjadi konflik yang besar dan memakan banyak korban jiwa bahkan meminimalisir terjadinya konflik serupa.

KESIMPULAN

Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindar dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan, membentuk sebuah rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang

konstruktif maupun yang destruktif. Konflik di Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan lama antara umat Muslim dan Kristen, walaupun keadaannya lebih kompleks. Konflik kekerasan di Maluku yang sebagian besar terkonsentrasi di Ambon, adalah salah satu konflik yang paling dahsyat yang pecah setelah kejatuhan rezim Soeharto. Konflik tersebut merenggut hampir 5.000 nyawa dari tahun 1999 sampai 2002 dan mengungsikan sepertiga dari penduduk Maluku dan Maluku Utara.

Pemicu konflik di Ambon adalah peristiwa pada 19 Januari 1999 selama liburan hari raya Muslim, Idul Fitri. Sebuah perselisihan kecil terjadi antara seorang pemuda Kristen dari Mardika, kabupaten di kota Ambon, dengan seorang pemuda Muslim dari Batumerah, sebuah desa di sebelah Mardika. Desas-desus yang memperburuk perpecahan yang sudah ada antara komunitas Kristen dan Muslim dimulai, mempengaruhi desa-desa di sekelilingnya ke dalam kekerasan. Pada awalnya, perkelahian hanya terjadi antara orang Kristen Ambon dan pendatang Muslim dari Sulawesi Selatan (Bugis, Buton dan Makassar), dengan masing-masing melancarkan serangan mendadak terhadap yang lain. Konflik diakhiri dengan kesepakatan damai warga Halmahera sejak Agustus 2000 dan mereka mulai saling berhubungan.

Berbagai upaya telah dilakukan agar konflik ini dapat berakhir, antara lain yang dipimpin oleh pemerintahan pusat dan daerah, petugas keamanan, masyarakat lokal dan kelompok perempuan serta LSM internasional dan lokal. Dua pendekatan utama dalam penanganan konflik di Maluku berasal dari upaya berikut yaitu pendekatan keamanan dan darurat; dan pendekatan pemulihan dan pembangunan. Pemerintah pusat memulai negosiasi damai antara komunitas Muslim dan Kristen yang akhirnya mencapai kesepakatan damai melalui Malino II pada bulan Februari 2002. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan sangat penting

dalam situasi konflik, karena dipercaya oleh masyarakat. Disisi lain, media juga mendapatkan peran penting dalam situasi konflik. Media dapat digunakan sebagai alat untuk membangun perdamaian, tetapi juga dapat menjadi dalang kekerasan. Beberapa contoh media yang digunakan sebagai alat membangun perdamaian selama konflik yaitu Gerakan Damai Baku Bae dengan menyelenggarakan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengakhiri konflik di Ambon dan juga membuat pelatihan bagi para wartawan tentang pelatihan jurnalisme perdamaian yang menciptakan Maluku Media Center (MMC).

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadrie, S. (1999). Konflik Etnis Ambon Dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis. *Antropologi Indonesia*, 58.
- Bakri, H. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City. *Jurnal Magister Ilmu Politik*, 1(1), 51–60.
- Buchanan, C. (Ed.). (2011). Pengelolaan konflik di Indonesia: sebuah analisis konflik di Maluku, Papua, dan Poso. Centre for Humanitarian Dialogue.
- Fajar, D. P. (2016). Teori-teori Komunikasi Konflik: Upaya Memahami Memetakan Konflik. Universitas Brawijaya Press.
- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik Keterampilan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: Grafika Pertama.
- Huda, Mi'rojul, Y. N. S. (2013). RESOLUSI KONFLIK KOMUNAL DI MALUKU PASCA REFORMASI. 1(1), 1–9.
- Indrawan, J. (2019). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.
- Ismail, R. (2021). RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN INTEGRATIF: STUDI ATAS RESOLUSI KONFLIK KEAGAMAAN AMBON. *Living*

- Islam: Journal of Islamic Discourses, Vol.3, 19 halaman.
- Lindawaty, D. S. (2011). Konflik Ambon: Kajian Terhadap Beberapa Akar Permasalahan dan Solusinya. *Politica*, 2(2), 271–297.
- Puspita, W. (2018). Manajemen Konflik: Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi, dan Pendidikan. Deepublish.
- Rahawarin, Y. (1999). KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA : Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual. 7, 95–120.
- Rahmat, M. (2019). Ensiklopedia Konflik Sosial. Tangerang: Loka Aksara.
- Rudiansyah, D. (2016). DIMENSI SOSIO-POLITIK KONFLIK AMBON Pengantar. 10, 161–174.
- Samsu, S. (2017). Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development). ISBN 978-979-24-0469-2.
- Suparlan, P. (2014). Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. Antropologi Indonesia.
- van Klinken, G. A. (2007). Perang kota kecil: kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori Dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 1–15.
- Waileruny, S. (2010). Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.